

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

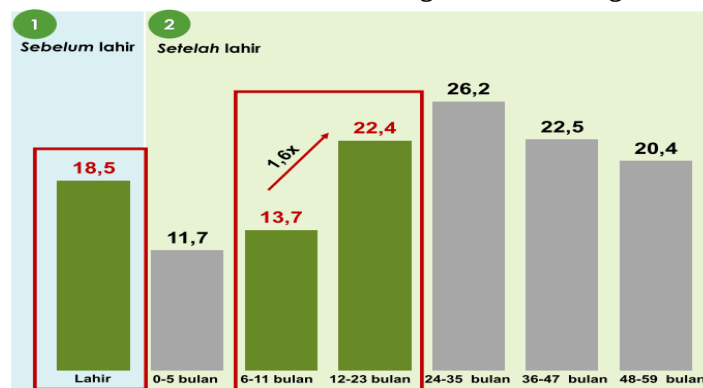
Kesehatan masyarakat dalam perwujudannya diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya kesehatan masyarakat, termasuk upaya peningkatan gizi masyarakat. Kesehatan masyarakat juga meliputi kesehatan pada anak yang masih tergambar dalam angka kematian bayi, balita, hingga anak-anak usia remaja yang masih menjadi perhatian. Penyakit menular dan penyakit tidak menular, seperti stunting yang juga menjadi masalah kesehatan serius.

Stunting adalah kondisi gangguan pertumbuhan anak yang menjadi masalah kesehatan masyarakat serius dan berdampak pada perkembangan kognitif atau otak anak. Stunting juga dikatakan sebagai kondisi kegagalan pertumbuhan (growth faltering) terjadi akibat ketidakcukupan nutrisi dalam jangka waktu lama, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 24 bulan. Kondisi ini diperparah dengan tidak terimbangnya pertumbuhan (catch up growth). Stunting diukur berdasarkan indeks panjang badan per umur (PB/U) atau tinggi badan per umur (TB/U) yang berada pada ambang batas Z-Score di bawah -2 SD atau standar deviasi (pendek/stunted) hingga -3 SD (sangat pendek/severely stunted) (Kemenkes, 2022).

Stunting merupakan masalah gizi kronis akibat asupan gizi yang tidak mencukupi dalam waktu cukup lama, akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Kondisi ini terjadi mulai dari janin di kandungan dan baru

terlihat saat anak berusia dua tahun (Kemenkes, 2022). Stunting berhubungan erat dengan ketidakcukupan zat gizi di masa lalu, termasuk masalah gizi yang bersifat kronis. Anak stunting memiliki rerata skor Intelligence Quotient (IQ) lebih rendah sebelas poin dibandingkan anak normal. Gangguan tumbuh kembang akibat kekurangan gizi usia dini yang tidak ditangani dapat berlanjut hingga dewasa, meningkatkan risiko kematian bayi dan anak, serta menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tidak maksimal saat dewasa.

Gambar 1. 1. Intervensi Pengukuran Stunting



Sumber: Data Buku Saku SSGI Tahun 2021-2022, Laporan SKI Tematik Tahun 2023

Berdasarkan grafik diatas memperlihatkan tren prevalensi stunting berdasarkan kelompok usia mulai dari sebelum kelahiran hingga usia 48-59 bulan. Pada saat lahir, angka stunting cukup tinggi mencapai 18,5%. Namun angka ini menurun menjadi 11,7% pada 0-5 bulan. Hal ini mengakibatkan terjadi peningkatan signifikan sebesar 1,6 kali lipat pada periode 6-11 bulan, di mana angka stunting naik menjadi 13,7%, dan terus meningkat hingga mencapai puncaknya sebesar 22,4% pada usia 12-23 bulan. Kondisi terburuk terjadi pada kelompok usia 24-35 bulan dengan angka stunting mencapai 26,2%. Setelah itu, tren mulai menurun menjadi 22,5% pada usia 36-47 bulan dan 20,4% pada usia 48-59 bulan.

Kondisi stunting menunjukkan karakteristik berbeda pada setiap tahap usia anak. Bayi 0-6 bulan dengan stunting tidak mudah dikenali secara kasat mata, namun dapat diidentifikasi dari pertumbuhan berat dan panjang badan yang tidak memenuhi standar kurva WHO. Kekurangan nutrisi maternal selama kehamilan dan pemberian ASI eksklusif yang tidak optimal menjadi penyebab utama. Anak usia 6-24 bulan mulai memperlihatkan tanda lebih jelas dengan postur tubuh yang lebih pendek dibanding teman sebaya dan menunjukkan keterlambatan perkembangan motorik serta kognitif. MPASI tidak bergizi, infeksi berulang, dan sanitasi buruk berkontribusi terhadap kondisi ini. Sementara itu, anak usia 2-5 tahun dengan stunting menampilkan dampak yang lebih signifikan, tidak hanya pertumbuhan fisik yang jauh tertinggal tetapi juga keterlambatan perkembangan kognitif dan sosial-emosional. Risiko jangka panjang seperti kemampuan belajar menurun dan penyakit kronis meningkat. Pencegahan stunting harus dimulai sejak kehamilan hingga usia dua tahun (1.000 Hari Pertama), meliputi pemantauan pertumbuhan, nutrisi seimbang, sanitasi baik, dan stimulasi psikososial tepat (Tim Medis Siloam Hospitals, 2024)

Pola asuh berperan dalam mencegah stunting melalui beberapa intervensi efektif. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dan MPASI bergizi setelahnya dengan frekuensi, jumlah, dan variasi sesuai usia anak sangat penting. Praktik kebersihan seperti mencuci tangan dengan sabun, menjaga lingkungan bersih, dan menyediakan air minum aman juga menjadi kunci. Stimulasi dini melalui permainan, percakapan, dan pembacaan buku serta menciptakan lingkungan aman mendukung perkembangan optimal anak. Perawatan kesehatan

rutin di posyandu untuk pemantauan pertumbuhan dan imunisasi harus dilakukan. Pendidikan gizi bagi orangtua meningkatkan kesadaran tentang pencegahan stunting. Anak berisiko stunting ketika tidak mendapat ASI eksklusif, MPASI tidak adekuat, hidup dalam kondisi tidak higienis, kurang stimulasi, dan jarang mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Intervensi tepat pada pola asuh dapat mencegah risiko stunting secara signifikan (Satuan Tugas Stunting, 2024).

Pola asuh atau parenting memiliki peran dalam upaya mengatasi stunting yang dapat diartikan bahwa pola asuh yang efektif berkorelasi kuat dengan pemberian nutrisi dan perawatan kesehatan yang lebih baik bagi anak. Balita yang mendapatkan pengasuhan tidak memadai memiliki risiko 3,9 kali lebih tinggi mengalami stunting dibandingkan dengan anak-anak yang mendapatkan pengasuhan yang mendukung (Fauziyah et al., 2023). Faktor sosial ekonomi juga berperan signifikan, dimana keluarga dengan status ekonomi rendah atau memiliki banyak anak (empat atau lebih) menunjukkan tingkat stunting mencapai 60% akibat keterbatasan perhatian dan sumber daya yang terbagi. Data statistik mengungkapkan bahwa 32,3% balita mengalami stunting, dengan korelasi antara pola pengasuhan dan stunting (nilai p 0,043). Oleh karena itu, penanganan stunting memerlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pengasuhan anak, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi dinamika keluarga dan kesehatan anak.

Komitmen ini dituangkan dalam perwujudan upaya penurunan angka prevalensi stunting yang diawali dengan pengesahan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang diperbarui dari Peraturan

Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang gerakan nasional percepatan perbaikan gizi. Hal ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan negara untuk mempercepat penurunan angka prevalensi stunting tahun 2024 dengan memberikan landasan untuk semua stakeholder yang terlibat baik dalam instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat atau organisasi kelompok untuk bekerja sama dalam proses implementasi program yang dilakukan.

Tabel 1 1. Persentase Angka Prevalensi Stunting Provinsi Jambi 2021-2023

No	Tahun	Prevalensi Stunting (%)
1.	2021	22,4%
2.	2022	18%
3.	2023	13.5%

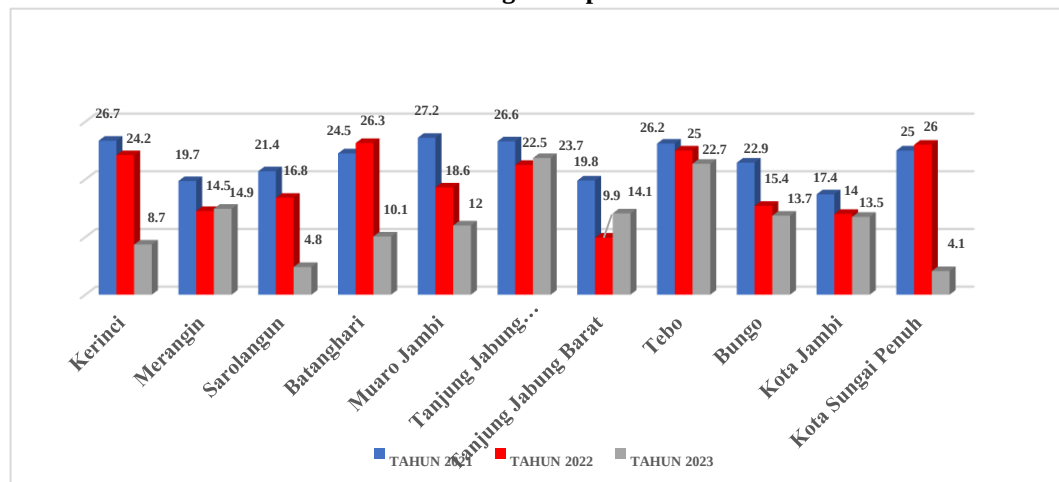
Sumber: Data Buku Saku SSGI Tahun 2021-2022, Laporan SKI Tematik Tahun 2023

Berdasarkan data tabel diatas bisa dilihat bahwa Provinsi Jambi adalah salah satu daerah yang mengalami masalah stunting. Pada tahun 2021 sebesar 22,4% dan pada tahun 2022 sebesar 18,0%, serta pada tahun 2023 berada pada persentase 13.5% berdasarkan persentase setiap provinsi di Indonesia. Walaupun mengalami penurunan signifikan Provinsi Jambi masih menjadi daerah yang berpotensi stunting disebabkan oleh banyak faktor diantaranya, faktor sosial ekonomi yang rendah di dalam rumah tangga, pengetahuan ibu rendah, rendahnya panjang badan bayi yang lahir, belum cukup waktu kelahiran, ASI yang diberikan tidak khusus dalam kurun waktu enam bulan pertama sesudah persalinan, pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang kurang maksimal (Putri & Dari, 2023, p. 2).

“Wakil Gubernur Jambi menekankan bahwa penurunan angka stunting merupakan indikator penting keberhasilan pembangunan daerah, Pemprov Jambi menargetkan penurunan hingga 12 persen pada tahun 2024. Untuk mencapai target ini perlunya upaya lebih intensif dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di tingkat kabupaten/kota, disertai kerja sama yang akurat dan keseragaman data” (Kominfo, 2024).

Pernyataan dari berita menjelaskan bahwa pada pembukaan rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jambi mengajak stakeholder dan OPD untuk berkolaborasi dan berkoordinasi atau bekerja sama dan berpartisipasi melaksanakan kegiatan untuk mencapai target capaian tahun 2024 diangka 12%. Hal ini adalah sebuah ajakan secara tersirat kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berkolaborasi dan berkoordinasi, dikarenakan meskipun Provinsi Jambi telah mencapai penurunan angka prevalensi stunting yang signifikan sebesar 13,5%, namun hasil ini masih dianggap belum optimal. Berdasarkan Laporan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) menunjukkan bahwa Provinsi Jambi berhasil menurunkan angka stunting yang signifikan dalam upaya mengatasi prevalensi angka stunting dapat dilihat dari data grafik dibawah ini menunjukkan persentase angka prevalensi stunting.

Gambar 1. 2. Persentase Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota Provinsi Jambi 2021-2023



Sumber: Data Buku Saku SSGI Tahun 2021-2022, Laporan SKI Tematik Tahun 2023

Pada prosesnya upaya penurunan angka prevalensi stunting di Provinsi Jambi memperlihatkan hasil yang cukup baik dengan dibuktikan dari persentase angka prevalensi stunting di setiap Kabupaten/Kota mengalami penurunan.

Provinsi Jambi menunjukkan komitmen dalam upaya menurunkan angka prevalensi stunting yang menjadi masalah kesehatan masyarakat yang kompleks. Pemerintah menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai stakeholder dalam merencanakan dan mengimplementasikan program dan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi, seperti melakukan kampanye edukasi publik yang intensif, perbaikan gizi masyarakat, peningkatan akses ke layanan kesehatan, serta intervensi sosial-ekonomi yang bertujuan mengentaskan kemiskinan sebagai akar masalah stunting.

Berdasarkan Instruksi Gubernur Jambi No. 7 Tahun 2023 pada perwujudannya dalam upaya penurunan angka prevalensi stunting di Provinsi Jambi. Gubernur menetapkan target penurunan stunting yang lebih tinggi dan membentuk tim koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memantau program-program. Selain itu instruksi ini diberikan untuk peningkatan akses masyarakat pada layanan kesehatan, gizi, dan sanitasi yang baik. Peran keluarga juga diutamakan, dengan adanya program edukasi dan pemberdayaan keluarga dalam pencegahan stunting. Dengan demikian Provinsi Jambi menunjukkan keseriusan dalam menangani stunting dan berupaya menciptakan gerakan bersama seluruh masyarakat untuk mewujudkan generasi masa depan yang lebih sehat.

Pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya penurunan stunting juga melaksanakan program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) sebagai program nasional yang digagaskan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN (Stunting.go.id, 2022). Program ini dalam implementasinya melibatkan partisipasi atau keterlibatan dari berbagai stakeholder yang bertujuan

untuk mencegah bertambahnya jumlah kasus stunting, melalui bantuan pemenuhan gizi dan nutrisi bagi anak dari keluarga berisiko stunting.

Pada implementasinya program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di Provinsi Jambi adalah inisiatif yang strategis untuk mengatasi masalah stunting. Program yang memiliki target sasaran yang ditujukan kepada keluarga-keluarga yang berisiko dan anak-anak yang mengalami stunting (ANTARA, 2023). Melalui program ini pemerintah Provinsi Jambi berupaya memberikan dukungan dan intervensi langsung yang menyeluruh, mulai dari asupan gizi, pola asuh, sanitasi, hingga akses pelayanan kesehatan. Adapun tujuannya untuk mengatasi masalah stunting secara efektif dan tidak semakin meluas. Dengan melakukan pendekatan yang terpadu dan fokus, diharapkan program BAAS dapat memberikan dampak signifikan dalam menurunkan angka stunting di Provinsi Jambi.

Hasil komitmen dan kerjasama yang baik dari berbagai stakeholder membuat terjadi peningkatan dalam kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan pola asuh yang tepat, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (Kemenkes, 2022). Koordinasi antar instansi pemerintah juga mengalami penguatan substansial dengan dibentuknya tim gugus tugas khusus dan sistem pelaporan terpadu yang merespon cepat dan efektif terhadap isu-isu terkait stunting. Akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya terpinggirkan, telah meningkat melalui pembangunan dan peningkatan kualitas Puskesmas serta penempatan tenaga kesehatan yang lebih merata.

Pembentukan tim satgas atau tim percepatan penurunan stunting (TPPS) yang dikoordinasikan untuk melakukan pendampingan kepada keluarga-keluarga

yang berpotensi teridentifikasi risiko stunting (Kemenko, 2022). Tim ini melaksanakan program-program, seperti pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, suplementasi zat besi dan asam folat, serta promosi ASI eksklusif. Selain itu, intervensi sanitasi dan penyediaan air bersih juga telah berkontribusi dalam menurunkan risiko infeksi yang dapat memperparah kondisi stunting.

Provinsi Jambi yang sudah mengimplementasikan upaya penurunan angka prevalensi stunting yang cukup baik, namun masih terdapat tantangan yang dihadapi dalam prosesnya diantaranya kondisi geografis daerah yang beragam dan sulit dijangkau, hal tersebut membuat adanya kesulitan dalam distribusi layanan dan sumber daya secara merata (Jambiprov, 2024). Selain itu adanya perubahan perilaku masyarakat, terutama terkait praktik pengasuhan anak dan pola makan, merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan pendekatan sensitif budaya dan konsistensi dalam edukasi, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, khususnya tenaga kesehatan terlatih, juga menjadi hambatan dalam mengoptimalkan implementasi program-program.

Peneliti mengambil isu ini dikarenakan permasalahan memiliki potensi yang cukup tinggi. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang diakibatkan oleh banyak faktor, seperti rendahnya pengetahuan seorang ibu, kekurangan gizi pada ibu hamil dan menyusui, infeksi pada anak, dan sanitasi yang buruk, kondisi lingkungan, dan lainnya, hal tersebut menyebabkan adanya risiko stunting. Selain itu persentase angka stunting yang banyak terindikasi diberbagai daerah membuat peneliti menginginkan untuk menganalisis dan memahami lebih

jelas tentang permasalahan stunting agar bisa mengembangkan cara alternatif untuk mencegah ataupun meminimalisir resiko stunting di masa yang akan datang.

Penelitian ini memiliki penelitian terdahulu dengan topik yang relevan dan berkaitan dengan topik yang sedang dianalisis saat ini dengan menggunakan beberapa penelitian terdahulu di dalam proses penemuan topik yang dikaji. Penelitian yang dilakukan Priyono, (2020) berjudul “Strategi Percepatan Penurunan Stunting Perdesaan (Studi Kasus Pendampingan Aksi Cegah Stunting di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang)” membahas tentang Penelitian oleh Priyono mengkaji strategi percepatan pengurangan stunting di Desa Banyumundu, Pandeglang dalam tantangan stunting di Indonesia yang mempengaruhi 30,7% balita, melebihi ambang batas WHO sebesar 20%. Studi ini menekankan intervensi selama 1.000 hari pertama kehidupan yang berfokus pada peningkatan pola pengasuhan dan status gizi. Prioritas diberikan pada program intervensi nutrisi jangka pendek yang agresif, sementara strategi jangka panjang menekankan kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk kemitraan publik-swasta. Keterlibatan dan peningkatan kapasitas masyarakat ditekankan sebagai komponen utama dalam upaya pencegahan stunting sesuai peraturan pemerintah. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja komprehensif untuk mengatasi stunting di daerah pedesaan dengan menekankan intervensi terarah dan partisipasi aktif masyarakat.

Penelitian selanjutnya Imron et al., (2022) berjudul “Sinergi Lintas Sektor Dalam Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur” membahas tentang masalah stunting di Kabupaten Nganjuk, Indonesia yang memiliki prevalensi 25,3% berdasarkan survei tahun 2021. Studi ini menekankan

pentingnya tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, lembaga sosial, dan akademisi untuk mengatasi stunting secara efektif. Keterlibatan aktif pemerintah daerah dan petugas kesehatan masyarakat, seperti bidan desa dan asisten keluarga, ditemukan sangat penting dalam mengidentifikasi dan membantu keluarga dengan anak stunting. Penelitian juga membahas tantangan terkait pengetahuan dan praktik pengasuhan orang tua yang menghambat pencegahan stunting. Untuk meningkatkan efektivitas upaya kolaboratif untuk menumbuhkan pemahaman dan motivasi bersama diantara semua pemangku kepentingan. Kebutuhan akan pendekatan multi-sektor yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak dan masyarakat untuk mengurangi stunting di Nganjuk.

Berdasarkan penelitian Wijayanti et al., (2023) berjudul “Inovasi Sosial pada Penanganan Stunting: Penerapan Konsep Bapak Asuh Anak Asuh di Tambakdahan Subang Jawa Barat” membahas tentang implementasi program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di Tambakdahan, Subang dalam pendekatan tata kelola kolaboratif melibatkan pejabat pemerintah daerah dan masyarakat. Program inovasi Dashat (dapur sehat) untuk menyediakan nutrisi yang tepat bagi anak-anak stunting. Keberhasilan program dikaitkan pada keterlibatan aktif birokrat lokal dan masyarakat dalam mendukung keluarga terdampak untuk menekankan pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam mengatasi isu kesehatan masyarakat dengan BAAS berpotensi menjadi model yang dapat diadaptasi di daerah lain.

Kemudian penelitian Sudirman et al., (2024) berjudul “Identifikasi Program Inovasi Kesehatan Pencegahan Dan Penanganan Stunting Berbasis Kearifan Lokal Di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo” membahas tentang upaya

pencegahan stunting di Kabupaten Limboto Gorontalo, Indonesia. Stunting, kondisi keterlambatan pertumbuhan anak akibat kekurangan nutrisi, saat ini mempengaruhi sekitar 162 juta anak di bawah lima tahun secara global, dengan proyeksi mencapai 127 juta pada tahun 2024 jika tren saat ini berlanjut. Penelitian ini mengungkap beberapa program inovasi kesehatan lokal yang diterapkan berdasarkan inisiatif meliputi program bimbingan orang tua atau wali, intervensi berbasis kearifan lokal seperti penyediaan makanan tambahan (bubur kacang hijau, susu, dan telur), serta pemanfaatan pos kesehatan masyarakat (posyandu) dan kampanye kesadaran masyarakat untuk melihat pentingnya solusi berbasis masyarakat dalam mengatasi stunting, hal tersebut menunjukkan bahwa pendekatan lokal yang inovatif menjadi kunci dalam upaya pencegahan dan pengelolaan stunting yang efektif.

Berdasarkan keempat penelitian terdahulu peneliti mengidentifikasi bahwa penelitian yang dilakukan Priyono, (2020), Imron et al., (2022), Wijayanti et al., (2023) dan Sudirman et al., (2024) membahas permasalahan stunting untuk melihat tata kelola kolaboratif dan keterlibatan berbagai stakeholder, seperti pemerintah daerah, masyarakat, lembaga sosial, dan akademisi melalui pertan inovasi lokal dan pendekatan berbasis masyarakat dalam mengatasi stunting, seperti program BAAS dan inisiatif berbasis kearifan. Selain itu keempat penelitian bertujuan sebagai upaya berkelanjutan untuk menurunkan prevalensi stunting diberbagai daerah. Hal ini menekankan partisipasi aktif masyarakat dan peningkatan kapasitas lokal sebagai upaya keberhasilan dalam mengurangi stunting.

Uraian diatas dari penelitian terdahulu bisa dilihat bahwa penelitian yang akan dilakukan saat ini memiliki fokus yang berbeda. Penelitian terdahulu

sebelumnya memiliki fokus pada implementasi inovasi program, upaya pencegahan dan strategi pemerintah, sedangkan penelitian yang sekarang ingin peneliti lakukan memiliki fokus ke arah mengoptimalkan *network governance* dari program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) sebagai upaya dalam penurunan angka prevalensi yang menggunakan lokasi penelitian di daerah Provinsi Jambi.

Pendekatan *network governance* yang diteliti melakukan tahapan analisis mendalam tentang interaksi antara stakeholder yang berkepentingan, diantaranya pemerintah, non pemerintah (swasta), organisasi masyarakat. Penelitian diarahkan pada pola kerjasama dan koordinasi hubungan diantara stakeholder dalam penyediaan sumber daya dan inovasi, organisasi masyarakat yang berhubungan dapat diartikan sebagai subjek dan objek dari kebijakan yang diimplementasikan.

Peneliti tertarik menganalisis permasalahan yang berjudul “Penerapan *Network Governance* Dalam Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) Di Provinsi Jambi”. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji tentang hubungan tata kelola jaringan kerjasama, selain itu penelitian ini juga mengkaji dinamika interaksi, mekanisme koordinasi dan kolaborasi yang terjalin antara stakeholder.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, adapun rumusan masalah pada penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana tata kelola jaringan kerjasama dalam menurunkan stunting di Provinsi Jambi melalui program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) ?
2. Apa tantangan yang mempengaruhi penerapan tata kelola jaringan dalam program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di Provinsi Jambi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisis penerapan tata kelola jaringan atau hubungan dalam upaya mengatasi stunting di Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tantangan yang mempengaruhi pengembangan hubungan tata kelola jaringan atau hubungan kerjasama dalam upaya penurunan stunting di Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat di dalamnya baik secara teoritis ataupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran ilmiah yang substansial dalam kajian mengenai kolaborasi dan koordinasi dalam interaksi antara Pemerintah dan stakeholder terkait dalam upaya mengatasi stunting, khususnya di Provinsi Jambi. Demikian diharapkan dapat memperluas pemahaman dan wawasan mengenai strategi-strategi yang efektif dalam menanggulangi masalah stunting.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi berbagai stakeholder, terutama Pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program untuk mengatasi permasalahan stunting di Provinsi

Jambi di masa mendatang. Selain itu bertujuan untuk membentangkan pengetahuan dan menjadi acuan bagi para peneliti atau praktisi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik yang sama. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan juga memiliki potensi untuk memberikan dampak praktis dalam upaya penanggulangan stunting.

1.5 Landasan Teori

Ilmu Pemerintahan menurut Taliziduhu Ndraha (2002) adalah ilmu yang mengkaji tentang proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik dan sipil dalam ruang lingkup pemerintahan (Syafiie, n.d., p. 11). Landasan teori merupakan suatu kerangka konseptual yang tersusun secara sistematis, terdiri dari definisi, konsep, dan proposisi yang saling berkaitan. Kerangka ini berfungsi sebagai dasar untuk menjelaskan, mereduksi, dan memprediksi fenomena yang menjadi objek penelitian (Nasution, 2023, p. 150).

Pada ruang lingkup kajiannya ilmu pemerintahan juga berkaitan dengan governance. Memahami kerangka konseptual untuk menganalisis fenomena salah satunya, ialah fenomena pemerintahan. Teori governance menurut Rhodes (2007) mengemukakan bahwa pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menyediakan sarana bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislasi atau pembuatan undang-undang (Richter et al., 2022, pp. 2–3). Olson mengembangkan konsep tata kelola terdistribusi, yang menggambarkan proses integrasi berbagai kepentingan pemangku kepentingan dari beragam sektor industri dan tingkat pemerintahan. Sorensen dan Triantafillou (2013) memperluas pemahaman tentang governance

dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah sebagai aktor negara dengan aktor non-pemerintah, termasuk sektor swasta dan masyarakat umum.

Penelitian ini menggunakan teori governance dengan pendekatan *network governance* untuk memberikan perspektif lebih spesifik dan komprehensif. Hubungan antara konsep-konsep terletak pada pemahaman tentang peran pemerintah dalam tata kelola publik. Pada konsep awal governance menekankan partisipasi masyarakat berkembang menjadi pemahaman tentang tata kelola terdistribusi yang melibatkan berbagai stakeholder dan akhirnya mengarah pada *network governance* yang menekankan kerjasama aktif antara pemerintah dan non-pemerintah. Pendekatan *network governance* dipilih sebagai kerangka analisis sesuai mengatasi permasalahan seperti stunting yang memerlukan keterlibatan dan kerjasama tata kelola jaringan dari berbagai sektor. Integrasi bertujuan untuk memahami secara mendalam permasalahan stunting dan menciptakan hubungan kerjasama yang efektif dalam menurunkan angka prevalensinya di Provinsi Jambi.

1.5.1 Network Governance

Network governance adalah teori jaringan menurut *Patrick Kenis* adalah suatu interaksi dan kolaborasi atau koordinasi antar aktor dalam mencapai tujuan bersama di ranah pemerintahan dan kebijakan publik. Kenis mendefinisikan jaringan sebagai kumpulan aktor yang terhubung melalui relasi formal dan informal, bekerja sama untuk mencapai tujuan spesifik. Pada konteks pemerintahan adalah jaringan yang melibatkan berbagai lembaga, organisasi, dan individu dengan kepentingan yang sama. Teori ini menggarisbawahi indikator dimensi jaringan, seperti struktur, jenis hubungan,

proses interaksi, dan hasil jaringan dapat dikaitkan langsung dengan target capaian yang diinginkan. Pemahaman mendalam terkait dinamika jaringan membantu merancang dan mengimplementasikan strategi efektif untuk mencapai tujuan kebijakan dan tata kelola lebih baik (Ansell & Torfing, 2022).

Provan dan Kennis (2008) menyatakan dalam mengelola pemerintahan dan melaksanakan kebijakan dilakukan dengan *network governance* sebagai cara membandingkan sistem pemerintahan. Pendekatan jaringan dilakukan melibatkan berbagai pihak dari bidang yang bekerja sama menjalankan kebijakan dan memberikan layanan kepada masyarakat untuk memberikan hasil yang efektif (Nahrawi & Ibrahim, 2021, p. 2540). *Network governance* memperlihatkan keberhasilan kebijakan lebih mudah dicapai apabila banyak pihak terlibat bekerja sama. Pendekatan ini membuat pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan menjadi fleksibel dan sesuai kebutuhan.

Konsep *network governance* erat kaitannya dengan aspek, yaitu kompleksitas permasalahan, saling ketergantungan antar lembaga atau organisasi, serta mekanisme penyelesaian masalah yang dihadapi dalam jaringan. Demikian teori ini berkaitan dengan kolaborasi dan koordinasi dalam menghadapi tantangan yang saling terkait dalam tata kelola publik modern.

Berdasarkan teori Provan dan Kennis (2008) mengembangkan kerangka kerja *network governance* terdiri dari tiga dimensi. Kerangka ini memberikan panduan untuk memahami dan menerapkan tata kelola kolaboratif dalam berbagai situasi di sektor publik. Pendekatan *network governance* mengakui dalam menghadapi permasalahan publik yang semakin rumit, pemerintah tidak

dapat bekerja sendirian. Sebaliknya diperlukan kerjasama berbagai stakeholder berkepentingan untuk menghasilkan solusi efektif dan berkelanjutan.

Menurut Provan dan Kennis (2008), terdapat tiga indikator yang mempengaruhi *network governance* pada proses tata kelola jaringan untuk mencapai tujuan bersama (Nahrawi & Ibrahim, 2021, p. 2541), yaitu:

a. Tata Kelola Struktur Jaringan

Tata Kelola Struktur Jaringan adalah dimensi yang mengatur struktur jaringan bertujuan mengoptimalkan dan meningkatkan efektivitas. Penambahan atau pengurangan jumlah aktor, memfasilitasi pembentukan jaringan baru, atau mengatur ulang hubungan antar aktor. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan bertujuan memastikan jaringan memiliki kombinasi tepat dari keahlian, sumber daya, dan perspektif untuk mencapai tujuan dalam *network governance*.

b. Tata Kelola Hasil Jaringan

Tata Kelola Hasil Jaringan adalah dimensi yang pada prosesnya melakukan optimalisasi hasil yang dihasilkan oleh jaringan. Pendekatan ini melakukan penyesuaian standar kinerja, alokasi sumber daya, atau perubahan insentif dalam jaringan bertujuan untuk mendorong jaringan menghasilkan hasil yang lebih baik atau berbeda dari sebelumnya.

c. Tata Kelola Interaksi Jaringan

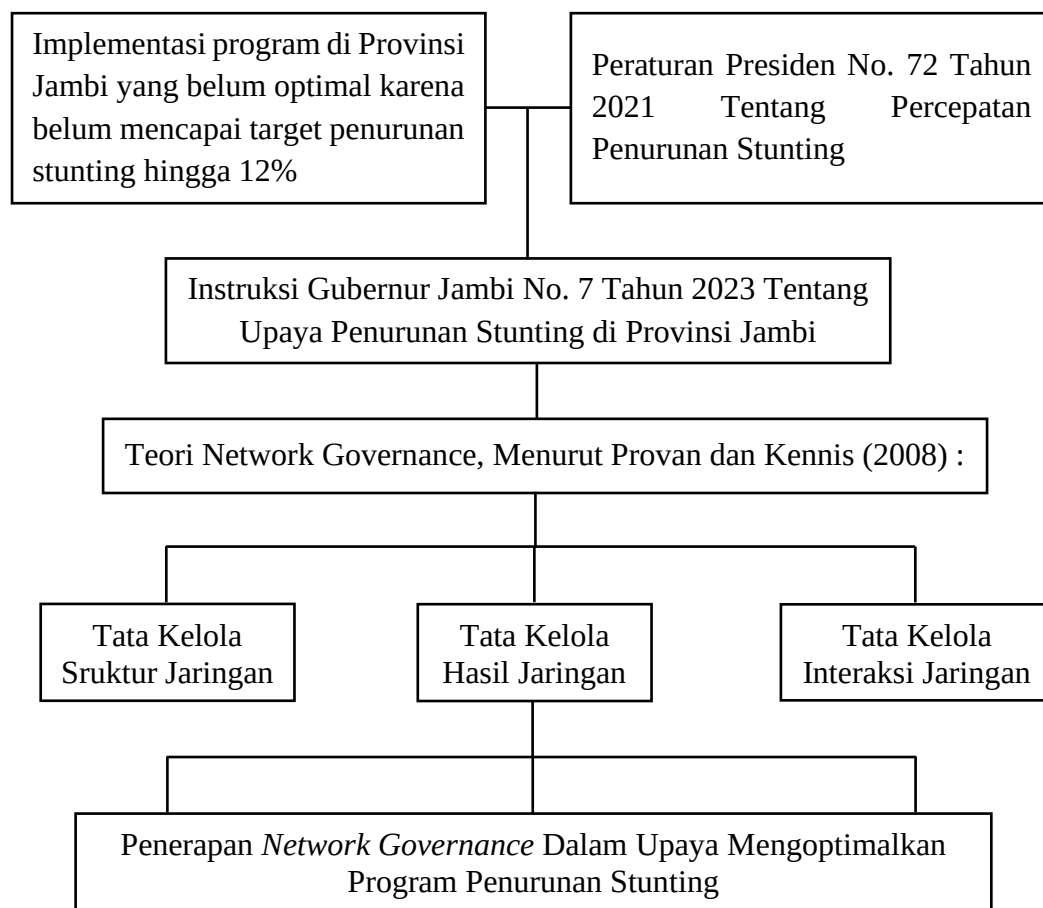
Tata Kelola Interaksi Jaringan adalah dimensi yang mengatur pengarahan interaksi antar aktor jaringan bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif dalam kolaborasi dan koordinasi pada proses

pengambilan keputusan bersama. Pendekatan bertujuan untuk memastikan interaksi dalam jaringan mengarah pada pencapaian tujuan bersama.

1.6 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran Menurut Widayat dan Amirullah (2002) adalah model konseptual mengenai teori yang berkaitan dengan berbagai faktor masalah dan sebagai penjelasan sementara pada proses penelitian. (Syahputri dkk., 2023, p. 161). Kajian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan *network governance* terkait tata kelola jaringan kerjasama terkait program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dalam upaya menurunkan angka prevalensi di Provinsi Jambi.

Gambar 1. 3. Kerangka Berpikir



Kerangka pemikiran merupakan dasar penelitian dalam memaknai sebuah permasalahan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dengan menggunakan teori dan hasil observasi maupun wawancara yang dilakukan dilapangan dengan memberikan batasan masalah. Visualisasi kerangka pemikiran dalam bentuk bagan membantu mengorganisir dan mengartikulasikan hubungan antar variabel atau konsep secara sistematis dalam penelitian.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas mengenai tata kelola jaringan kerjasama dalam upaya mengatasi stunting Provinsi Jambi, yaitu peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian pada penerapan *network governance* dalam mengatasi atau menurunkan angka prevalensi stunting di Provinsi Jambi.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif menurut Hilal dan Alabri (2013), metode dengan pendekatan yang menggambarkan fenomena dari perspektif informan, mengidentifikasi beragam realitas, serta memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena dalam konteks spesifiknya secara menyeluruh (Renggo, 2022, p. 121). Metode penelitian kualitatif mampu menguraikan hasil dari penelitian tentang optimalisasi penerapan *network governance* sebagai upaya untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Provinsi Jambi.

1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Moleong (2013), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara mendalam konteks yang alamiah (Moleong 2011, 2022, p. 4). Pendekatan ini merupakan

metode penelitian yang meng eksplorasi komprehensif terhadap persepsi, motivasi, dan tindakan subjek menggunakan kata-kata dan bahasa. Metode penelitian yang fleksibilitas membuat peneliti untuk beradaptasi sesuai temuan awal. Hal tersebut terjadi karena setiap informasi yang terkumpul berpotensi menjadi kunci pemahaman mendalam terhadap objek penelitian.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Provinsi Jambi yang berfokus pada wilayah instansi Pemerintahan. Penentuan lokasi penelitian yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mendapatkan hasil yang objektif dan data yang akurat tentang permasalahan yang sedang diteliti.

1.7.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada *network governance* dalam upaya menurunkan angka prevalensi stunting di Provinsi Jambi. Pembatasan fokus ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang topik tersebut.

1.7.4 Sumber Data Penelitian

Data penelitian kualitatif lebih banyak bersumber pada kondisi alamiah atau natural setting. Pada penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dan observasi sebagai metode pengumpulan data. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan

penelitian (Moleong 2011, 2022, p. 4). Sumber data penelitian ini adalah Dinas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi serta tim percepatan penurunan stunting Provinsi.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh secara tidak langsung dari berbagai sumber tertulis, termasuk laporan, profil, buku panduan, jurnal, dan dokumen lainnya. Metode pengumpulan data ini digunakan untuk mendapatkan informasi pendukung yang relevan dengan penelitian, melengkapi data primer yang dikumpulkan (Moleong 2011, 2022, p. 4).

1.7.5 Teknik Pengumpulan Informan

Penelitian kualitatif terdapat proses pengumpulan data, menurut Patton (2002), menyebutnya "*purposeful sampling* atau pengambilan sampel yang bertujuan dengan melibatkan pemilihan kasus-kasus informatif (kasus yang memiliki banyak informasi) berdasarkan strategi dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan oleh para peneliti (Moleong 2011, 2022, p. 4).

Snowball sampling yang juga dikenal sebagai pengambilan sampel berantai adalah proses pengumpulan data berdasarkan informasi dari laporan pertama, tiga laporan berdasarkan rekomendasi dari laporan kedua, dan seterusnya. Metode ini cukup efektif untuk pengguna wawancara mendalam (Heryana, A., & Unggul, 2018, p. 9).

Penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* digunakan untuk memilih informan yang memberikan informasi sesuai tujuan penelitian. *Snowball sampling* diterapkan

untuk memperluas jumlah informan secara bertahap, ketika informasi dari informan awal dirasa kurang akurat. Adapun informan penelitian, diantaranya:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi.
2. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi.
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi.
5. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Jambi.
6. Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Jambi.
7. Persatuan Umat Buddha Indonesia (PERMABUDHI) Provinsi Jambi.
8. PT. Asian Agri Provinsi Jambi.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara adalah proses pengumpulan data yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut (Zuriah, 2009), wawancara adalah suatu alat mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan dan

dijawab secara lugas tentang suatu situasi tertentu sehingga dapat mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat (Moleong 2011, 2022, p. 4).

b. Observasi

Pengumpulan data melalui observasi menurut Sukmadinata (2005), adalah teknik yang menggunakan metode pengamatan langsung terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Metode ini dilakukan secara partisipatif (pengamat terlibat dalam kegiatan) atau non-partisipatif (pengamat hanya mengamati tanpa terlibat). Observasi melibatkan panca indera untuk memperoleh informasi tentang perilaku alamiah, dinamika dan situasi yang ada. Teknik ini dilakukan secara terarah atau tidak terarah, dalam jangka waktu singkat atau panjang bertujuan untuk memahami atau menyelesaikan permasalahan melalui pengamatan sistematis (Nasution, 2023, p. 150).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui sumber-sumber tertulis yang telah ada sebelumnya. Menurut Zuriah (2009), teknik ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai jenis dokumen, termasuk arsip, buku teori, catatan peristiwa, gambar, dan karya monumental. Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap metode observasi dan wawancara penelitian kualitatif, menyediakan data historis dan kontekstual yang penting. Metode peneliti mengakses informasi yang dikumpulkan/dicatat sebelumnya, memberikan perspektif tambahan penelitian dan membantu dalam memvalidasi atau melengkapi data yang diperoleh melalui metode lain (Moleong 2011, 2022, p. 4).

1.7.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang melibatkan tiga tahap interaktif. Pendekatan ini berbeda dengan model *Spradley* yang menggunakan tahapan berurutan (analisis domain, taksonomi, komponensial, dan topik kultural). Pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, peneliti dapat secara fleksibel mengolah data melalui proses penyederhanaan, penyajian, dan penarikan kesimpulan, yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses analisis yang melibatkan pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data dari catatan penelitian, serta membuang informasi yang tidak relevan bertujuan untuk mengorganisasi data sehingga penarikan kesimpulan akurat dalam penulisan laporan akhir dan memastikan informasi dalam penelitian relevan pada analisis final.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap informasi yang dikumpulkan akan ditampilkan dalam berbagai format seperti single-entry, multi-entry, flowcard, atau teks naratif bertujuan memudahkan peneliti memahami situasi yang sedang diteliti. Selain itu peneliti juga menggunakan penyajian data dalam penelitian ini dengan melakukan pengkodean atau pengcodingan data yang dilakukan menggunakan Nvivo. Penyajian data yang terstruktur juga membantu peneliti dalam merumuskan kesimpulan sementara dan merencanakan langkah-langkah analisis selanjutnya.

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah proses mengidentifikasi temuan baru. Kesimpulan ini dapat berupa deskripsi objek penelitian, hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau bahkan teori baru. Proses ini dimulai dari gambaran awal, kemudian tahapan reduksi dan penyajian data, peneliti mengidentifikasi informasi yang kurang dan verifikasi. Hasil akhirnya adalah kesimpulan yang lebih mendalam untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang fenomena yang diteliti.

1.7.8 Keabsahan Data

Keabsahan atau triangulasi data adalah proses validitas pada penelitian untuk menguji data yang diperoleh dan dikumpulkan, serta memastikan kualitas dan keabsahan informasi pada penelitian. Penelitian kualitatif Menurut Moleong (2013) terdapat empat triangulasi (Renggo, 2022, p. 121), yaitu:

a. Triangulasi Data

Triangulasi data adalah tahapan verifikasi informasi dari berbagai sumber data untuk menguji validasi *network governance* pada program untuk pemeriksaan data melalui stakeholder yang berpartisipasi dalam kerjasama, baik dari pemerintah, non pemerintah (swasta). Hasil analisis dari informasi yang diperoleh akan disimpulkan dan disepakati bersama stakeholder.

b. Triangulasi Teori

Triangulasi teori adalah tahapan yang melibatkan proses pendekatan metodologis dengan menerapkan berbagai perspektif teoritis melalui penggunaan kerangka teoretis, serta membandingkan prediksi dari beberapa

teori dengan data empiris yang diperoleh untuk menginterpretasikan dan menganalisis multi-teoretis yang memberikan pemahaman komprehensif.

c. Triangulasi Metode

Triangulasi Metode adalah tahapan menggabungkan teknik dan waktu pada pengumpulan informasi. Triangulasi teknik digunakan untuk membandingkan data dari berbagai sumber dan memverifikasi hasil wawancara dari informasi dokumen dan observasi. Triangulasi waktu adalah tahapan verifikasi data yang dikumpulkan pada waktu berbeda untuk memastikan hasil informasi data yang diperoleh dan dikumpulkan konsisten.

d. Triangulasi Peneliti

Triangulasi peneliti adalah tahapan dari proses pengumpulan dan analisis informasi berbagai sumber. Informasi yang diperoleh akan diverifikasi menggunakan teknik observasi yang bertujuan untuk memberikan pemikiran yang luas dan objektif pada hasil temuan penelitian.

Peneliti menggunakan triangulasi data dan metode untuk memverifikasi informasi dari berbagai sumber dengan menggabungkan wawancara, observasi partisipan, pertanyaan tertutup, catatan terstruktur, jurnal ilmiah, catatan pribadi, dan gambar dalam triangulasi data. Triangulasi metode menganalisis dan membandingkan informasi dari wawancara, dokumen, dan observasi untuk memeriksa keakuratan. Pengumpulan data pada waktu berbeda memastikan konsistensi hasil. Strategi ini menghasilkan perspektif beragam tentang fenomena penelitian, meningkatkan kepercayaan data dan memungkinkan pemahaman hasil dalam konteks yang berbeda (Moleong 2011, 2022, p. 4).